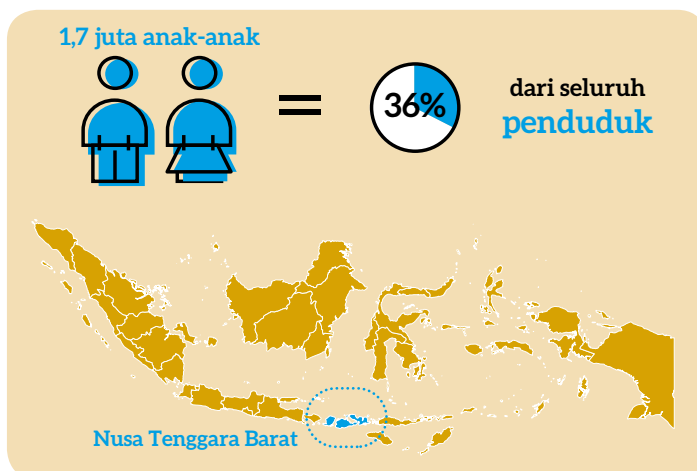




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau biasa disebut sebagai NTB, termasuk provinsi dengan jumlah muda yang signifikan. Sebanyak 1,7 juta orang atau 36 persen dari total jumlah penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Lebih dari empat di antara 10 anak tinggal di daerah perkotaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.



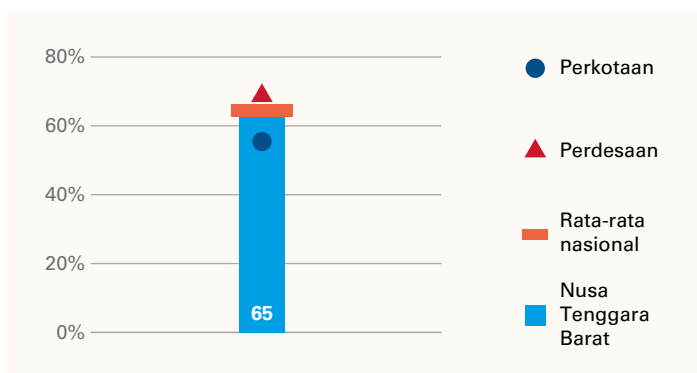
TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Lebih dari 360.000 anak (20 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada tahun 2015 (Rp 10.331 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi rentan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, 65 persen anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, dengan ketimpangan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi Nusa Tenggara Barat

	Persen	Jumlah (juta)
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	17,1	0,8
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	20,5	0,4
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	71,0	1,2



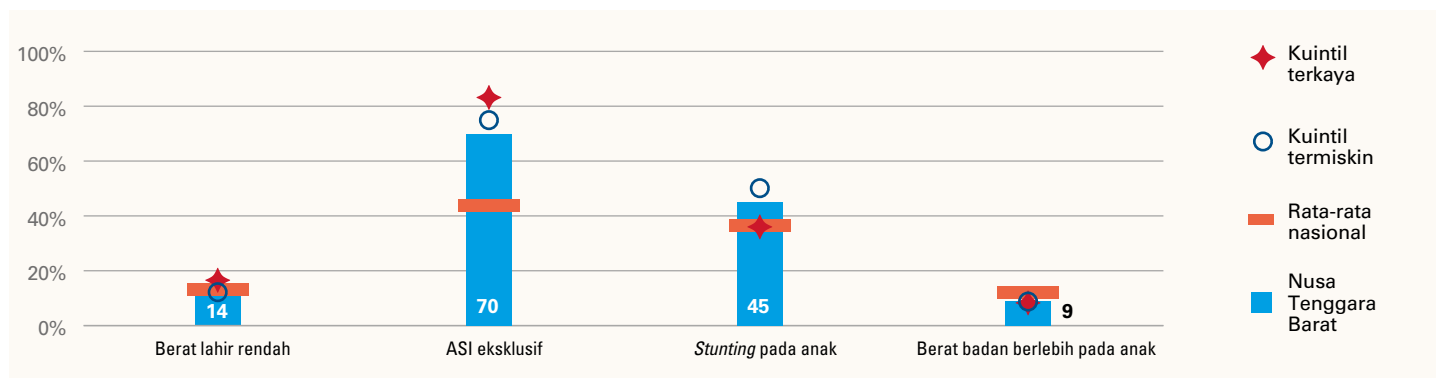
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Tujuh dari 10 bayi di Provinsi NTB diberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya, yang merupakan angka tertinggi di Indonesia.

Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, termasuk di wilayah perkotaan. Sekitar 14 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan 45 persen anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibanding usia) pada tahun 2013.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



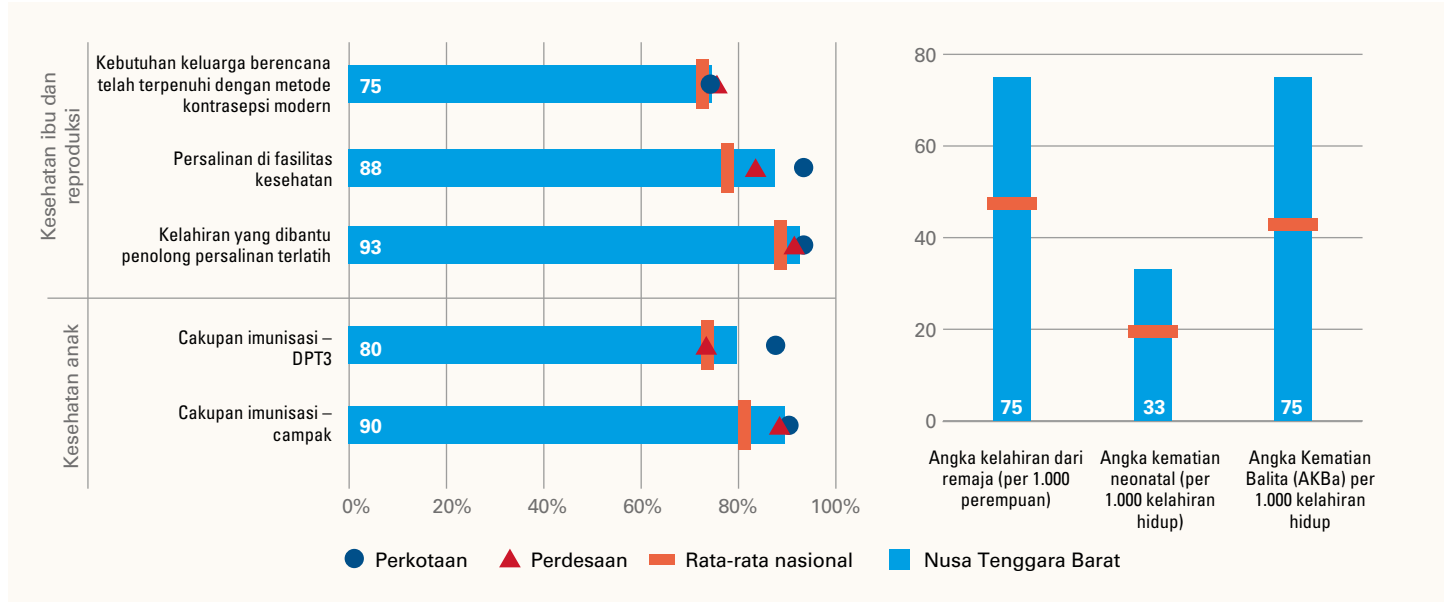
Meskipun sudah ada kemajuan, angka kematian anak masih sangat tinggi. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 33 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupannya dan 75 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Sebagian besar perempuan dapat mengakses layanan persalinan dan 93 persen kelahiran dibantu oleh penolong persalinan terlatih. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan telah berkurang. Namun, layanan kesehatan reproduksi tetap masih perlu

perbaikan, termasuk dalam hal peningkatan akses terhadap metode kontrasepsi modern.

Pada tahun 2015, 80 persen anak-anak menerima tiga dosis vaksin DTP yang dianjurkan, dan 90 persen mendapatkan vaksinasi campak, yang berarti di atas rata-rata nasional. Diperlukan upaya terus-menerus untuk mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi.

Ketimpangan berdasarkan wilayah pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS

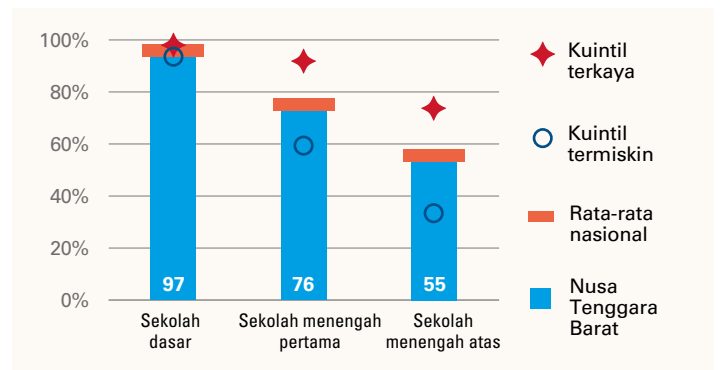


Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 97 persen pada tahun 2015, meskipun banyak anak usia pra-sekolah sudah masuk sekolah dasar.

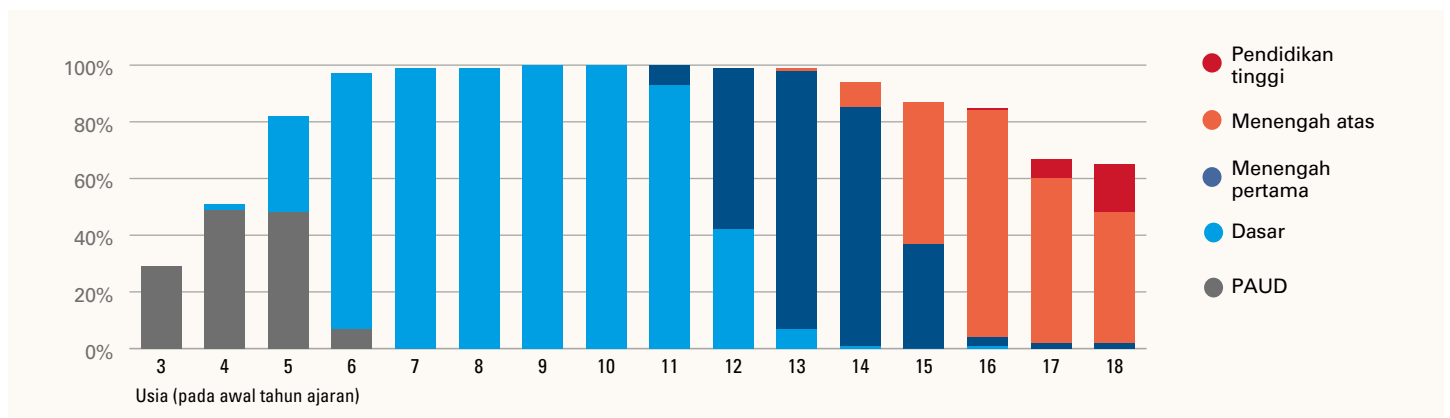
Provinsi NTB hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang jauh lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Hanya 39 persen anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan 19 persen anak dalam kemampuan matematika.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



Persentase anak-anak yang masuk sekolah berdasarkan usia



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



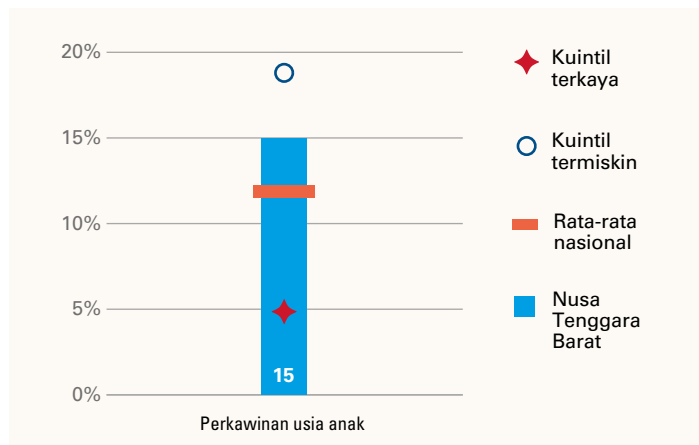
Praktik perkawinan usia anak telah menurun. Di Provinsi NTB, 15 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015, yang berarti di atas rata-rata nasional. Tingkat perkawinan usia anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.

15% perempuan menikah sebelum berusia **18**



Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak



TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI

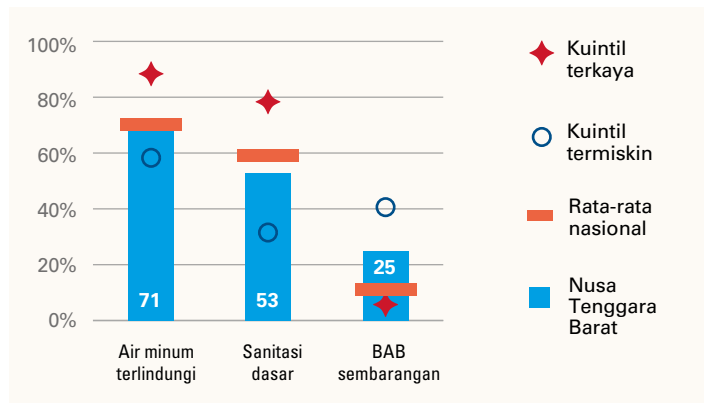


Pencapaian akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan kebersihan sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, sekitar setengah dari jumlah penduduk menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, sementara seperempat masih mempraktikkan BAB sembarangan. Hanya 45 persen sekolah sudah memiliki fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Cakupan sumber air minum yang layak sudah lebih

tinggi, baik di rumah tangga maupun sekolah.²

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dan tempat tinggal sangat mencolok, yang menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan ke dalam kebijakan dan praktik. Sejumlah kemajuan sudah dicapai melalui penerapan program sanitasi total berbasis masyarakat. Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses terhadap air dan sanitasi



sekolah dengan layanan air dasar = 82%

Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%)	82
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%)	45

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	91
--	----

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

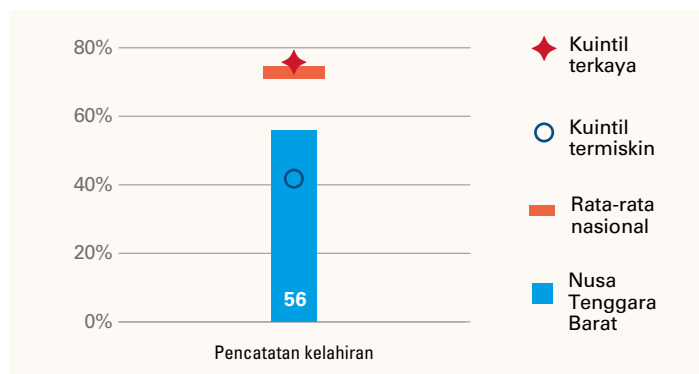


Peningkatan cakupan pencatatan kelahiran perlu dipercepat: pada tahun 2015, hanya 56 persen anak di bawah usia 5 tahun telah memiliki akta kelahiran. Masih terdapat perbedaan besar antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan berdasarkan status kekayaan rumah tangga, yang disebabkan hambatan keuangan dan ketersediaan pelayanan (*supply-side barriers*).

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Di Provinsi NTB, seperempat dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

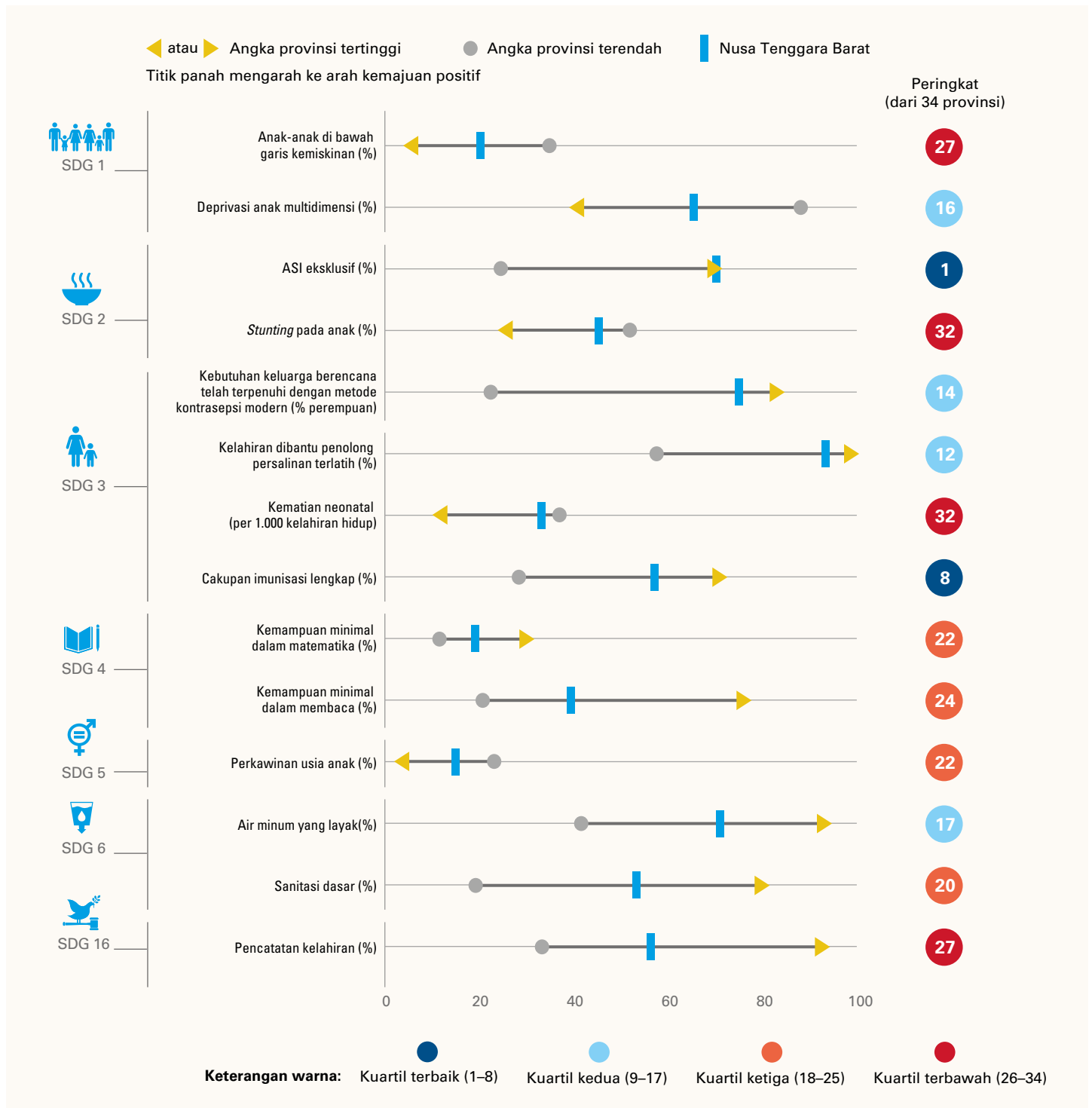
Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi NTB dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi NTB dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi NTB untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Data menurut provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuartil (biru tua untuk kuartil terbaik dan merah untuk kuartil terbawah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan). Informasi detail tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

- 1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.
- 2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org